



KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI RPJMN 2025–2029 MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Repaldi Ganesa^{1*}, Bayu Alifta Parhendi², Rendi Revaldo³, Akbar Barokah⁴,
Okky Danu Wijaya⁵, Eva Susanti⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum,
Universitas Baturaja

*Penulis Korespondensi: repalex.id@gmail.com

Abstract. *Regional government leadership plays a strategic role in supporting the implementation of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029 as a foundation for achieving Indonesia Emas 2045. This study aims to analyze the role of regional government leadership in supporting the implementation of the RPJMN 2025–2029, identify the synergy between national and regional development, and examine the challenges and leadership strategies required to achieve the vision of Indonesia Emas 2045. This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing data from laws and regulations, books, scientific journals, and official development planning documents. Data were analyzed using a descriptive qualitative approach through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that regional government leadership plays a crucial role in aligning regional development plans with the RPJMN, improving governance quality, developing human resources, strengthening regional economies, and promoting digital transformation and public service innovation. However, the implementation of the RPJMN still faces several challenges, including limited bureaucratic capacity, regional development disparities, fiscal constraints, and intergovernmental coordination issues. Therefore, visionary, adaptive, innovative, and collaborative leadership is essential to support the success of national development. Strong synergy between the central and regional governments is expected to ensure that the implementation of the RPJMN 2025–2029 serves as a solid foundation for realizing Indonesia Emas 2045.*

Keywords: *Regional Government Leadership, RPJMN 2025–2029, National Development, Regional Development, Indonesia Emas 2045.*

Abstrak. Kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, mengidentifikasi sinergi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta mengkaji tantangan dan strategi kepemimpinan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen perencanaan pembangunan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah berperan penting dalam menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong transformasi digital dan inovasi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi RPJMN masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas birokrasi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan fiskal daerah, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang visioner, adaptif, inovatif, dan kolaboratif guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, implementasi RPJMN 2025–2029 diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, RPJMN 2025–2029, Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah, Indonesia Emas 2045.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyusun perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan secara terpisah dari pembangunan daerah karena keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu, pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebaliknya, kemajuan pembangunan daerah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Tahap awal pelaksanaan RPJPN tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN 2025–2029 menjadi pedoman pembangunan nasional yang memuat arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta sasaran pembangunan yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam implementasinya, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras

dengan RPJMN agar tercipta keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Keselarasan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional di berbagai wilayah Indonesia.

Keberhasilan integrasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan daerah. Kepala daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam program-program pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan kolaboratif diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki posisi yang strategis dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029. Melalui kepemimpinan yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional sehingga mampu mempercepat terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep, teori, serta berbagai temuan ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi RPJMN. Metode yang digunakan untuk memahami fenomena kepemimpinan daerah dalam konteks pembangunan nasional secara mendalam dan komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. mengenai Kepemimpinan Pemerintahan dan Masa depan Pembangunan Daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan kajian politik gender dan kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui

tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji peran dan kontribusi kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029, serta menilai pentingnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Nasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala daerah dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan mengimplementasikan program pembangunan secara efektif.

Kepala daerah berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan arah pembangunan nasional, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dalam konteks implementasi RPJMN 2025–2029, kepemimpinan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan terlaksananya agenda pembangunan yang berfokus pada transformasi ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pembangunan wilayah yang merata.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah yang efektif mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi daerah. Kepala daerah yang visioner dan inovatif dapat mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan berbagai inovasi pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas birokrasi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan anggaran, dan tuntutan transformasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan

yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil agar berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Semakin baik kualitas kepemimpinan daerah, semakin besar kontribusinya terhadap keberhasilan implementasi RPJMN 2025–2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Implementasi RPJMN 2025–2029 sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045

Hasil kajian menunjukkan bahwa RPJMN 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 yang berfungsi sebagai fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN ini memuat berbagai prioritas pembangunan nasional yang berfokus pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah yang merata, serta penguatan ketahanan nasional. Keberhasilan pelaksanaan agenda tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan dan program pembangunan nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD. Keselarasan antara RPJMN dan RPJMD menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi RPJMN 2025–2029 di daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian target pembangunan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Melalui kepemimpinan yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerah dan mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Namun demikian, pelaksanaan RPJMN 2025–2029 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kapasitas daerah, keterbatasan fiskal, kualitas sumber daya aparatur, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan tersebut

memerlukan kepemimpinan daerah yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, RPJMN 2025–2029 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan agenda pembangunan nasional ke dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintahan daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera pada tahun 2045.

Peran Strategis Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi RPJMN 2025–2029

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029 sebagai tahap awal pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala daerah tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang bertanggung jawab memastikan program dan kebijakan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional.

Salah satu peran utama kepemimpinan daerah adalah menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN 2025–2029. Melalui penyusunan RPJMD yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran nasional. Keselarasan tersebut menjadi penting untuk menciptakan efektivitas pembangunan serta menghindari terjadinya tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, kepemimpinan pemerintahan daerah berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu prasyarat keberhasilan implementasi RPJMN karena dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, kepala daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,

dan keterampilan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan agenda RPJMN yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam meningkatkan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, kepemimpinan daerah berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja. Penguatan ekonomi daerah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RPJMN memerlukan kemampuan kepala daerah dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat dukungan sumber daya, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas birokrasi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan anggaran daerah, dan tuntutan transformasi digital masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang visioner, adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar pemerintah daerah mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dan mengoptimalkan pelaksanaan RPJMN 2025–2029.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi RPJMN 2025–2029. Semakin efektif kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala daerah, semakin besar peluang tercapainya tujuan pembangunan nasional yang menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sinergi Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan nasional dan pembangunan daerah memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana pembangunan nasional memberikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan, sedangkan pembangunan daerah berperan sebagai pelaksana berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena

itu, keberhasilan pencapaian target RPJMN sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, sinergi pembangunan diwujudkan melalui penyelarasan antara RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD yang disusun oleh pemerintah daerah. Keselarasan perencanaan tersebut memungkinkan terciptanya integrasi program pembangunan sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional tanpa mengabaikan potensi dan karakteristik daerah.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sinergi pembangunan nasional dan daerah memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

Selain itu, sinergi pembangunan membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, kepala daerah berperan sebagai penghubung yang memastikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi berjalan dengan baik sehingga kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara optimal. Kepemimpinan yang kolaboratif menjadi penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan sinergi pembangunan nasional dan daerah, seperti perbedaan prioritas pembangunan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, ketimpangan kemampuan fiskal daerah, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian target RPJMN.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar sinergi pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, implementasi RPJMN 2025–2029 dapat terlaksana secara lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Tantangan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Mendukung RPJMN 2025–2029

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian target pembangunan nasional. Tantangan tersebut berasal dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, kapasitas fiskal, hingga dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas birokrasi daerah. Meskipun reformasi birokrasi terus dilakukan, masih terdapat daerah yang menghadapi permasalahan terkait kompetensi aparatur, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan serta mengurangi efektivitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, kepala daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah. Perbedaan kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pertumbuhan ekonomi menyebabkan kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan tidak sama. Daerah yang memiliki sumber daya terbatas sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam situasi tersebut, kepemimpinan daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi lokal dan mencari solusi inovatif untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang ada.

Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai program pembangunan. Keterbatasan anggaran dapat

memengaruhi pelaksanaan program prioritas yang mendukung RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, kepala daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah secara efektif serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Perbedaan prioritas, keterlambatan penyelarasan perencanaan, dan kurang optimalnya komunikasi antarlembaga dapat menghambat implementasi program pembangunan. Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan daerah yang kolaboratif sangat diperlukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan lainnya adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Namun, masih terdapat daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital maupun kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, kepala daerah perlu mendorong inovasi dan percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi RPJMN 2025–2029 tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan kepemimpinan pemerintahan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kepemimpinan yang visioner, adaptif, inovatif, dan kolaboratif menjadi faktor penting dalam mengatasi hambatan pembangunan serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Strategi Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan RPJMN 2025–2029. Sebagai pelaksana pembangunan di tingkat daerah, kepala daerah dituntut untuk mampu merumuskan dan menerapkan strategi kepemimpinan yang mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Strategi

tersebut diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN 2025–2029. Kepala daerah perlu memastikan bahwa RPJMD, program kerja, dan kebijakan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional. Sinkronisasi ini penting agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, kepala daerah perlu mendorong profesionalisme aparatur sipil negara, memperkuat sistem pengawasan, dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi strategi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan penguasaan teknologi masyarakat. Pembangunan SDM yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing, sehingga mampu mendukung transformasi ekonomi yang menjadi salah satu agenda utama RPJMN 2025–2029.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penguatan ekonomi daerah merupakan strategi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerah, mendorong investasi, memberdayakan UMKM, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Upaya tersebut dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional.

Di era digital, percepatan transformasi digital pemerintahan menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, pengelolaan data pembangunan, dan administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu,

kepala daerah perlu mendorong digitalisasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi.

Selain aspek internal pemerintahan, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi strategi penting. Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa strategi kepemimpinan daerah menuju Indonesia Emas 2045 harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan kolaboratif. Kepemimpinan yang mampu menyinergikan perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat ekonomi daerah, serta memanfaatkan teknologi secara optimal akan menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing pada tahun 2045

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Mendukung Implementasi RPJMN 2025–2029 Menuju Indonesia Emas 2045, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang bertanggung jawab menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam program dan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Implementasi RPJMN 2025–2029 sebagai tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kepala daerah berperan penting dalam menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong transformasi digital dan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, pelaksanaan RPJMN 2025–2029 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas birokrasi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan fiskal daerah, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan daerah yang visioner, adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif.

Dengan demikian, keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan RPJMN 2025–2029. Semakin kuat sinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta semakin efektif strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka semakin besar peluang tercapainya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing guna mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat pada tahun 2045.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
- Cahyono, B., Rahaju, T., & Suprpto, F. A. (2026). *Implementation Readiness of RPJPN 2025–2045: Strengthen the Role of Bappenas in Supporting Long-Term Development Planning*. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 7(1), 154–168.
- Winari, S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagai Sistem Pemerintahan yang Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan SDM untuk Indonesia Emas 2045*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Maulana, D., & Berthanila, R. (2025). *Kolaborasi Pentahelix, Nilai-Nilai Spiritual dan Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kualitas RPJPD di Indonesia*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Nijo, J., Lubis, Z., Susilo, T., Supriyo, S., & Risandi, A. B. (2025). *Model Kepemimpinan Strategik dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Adaptif Indonesia Emas 2045*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Kertati, I., Makarim, F. R., & Karningsih. (2025). *Pendampingan Strategis Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang Terpadu dengan RPJMD Merauke 2025–2029*. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.